

PELAKSANAAN PERAN PKK DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DESA KWADENGAN BARAT KECAMATAN SIDOARJO

Citra Sandhika Putri

15040254031 (PPKn, FISH, UNESA) ctrsandhika@gmail.com

Oksiana Jatiningsih

0001106703 (PPKn, FISH, UNESA) oksianajatiningsih@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran PKK dalam menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling: proportionate stratified random sampling*. Jumlah sampel yang diteliti sebesar 99 perempuan yang sudah menikah sebagai anggota PKK. Uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian digunakan untuk menguji coba angket penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik persentase dan didasarkan pada Teori Peran Biddle dan Thomas yang menyatakan bahwa *expectation, norm, performance, and evaluation* saling berkaitan dalam perilaku peran. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa, keempat perilaku dalam peran tersebut memperoleh hasil tidak sama. Artinya pelaksanaan peran PKK untuk menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat telah berperan, karena pelaksanaan PKK di Kwadengan Barat sudah merencanakan program-program, kegiatan yang ingin dicapai sudah berjalan baik, anggota PKK sudah melaksanakan tugas dengan baik hanya saja partisipasi dari masyarakat perempuan kurang terlibat dalam agenda yang sudah dibuat.

Kata Kunci : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, partisipasi masyarakat

Abstract

The purpose of this study is the implementation of the role of the PKK in mobilizing women's participation in community development in the West Kwadengan Village, Sidoarjo District. This research uses a quantitative approach with descriptive methods. Data were collected using a questionnaire. The sampling technique uses probability sampling: proportionate stratified random sampling. The number of samples studied was 99 married women who were PKK members. Validity and reliability tests in the study were used to test the research questionnaire. The data analysis technique in this study uses percentage techniques and is based on the Role Theory of Biddle and Thomas which states that expectation, norm, performance, and evaluation are interrelated in role behavior. Overall, the results of the study indicate that, that the four behaviors in that role get different results. This means that the implementation of the role of the PKK to mobilize women's participation in community development has played a role, because the implementation of the PKK in Kwadengan Barat has planned programs, the activities to be achieved have gone well, PKK members have carried out their duties well only that the participation of the women's community is less involved in agenda that was created.

Keywords: Empowerment and Family Welfare, community participation

PENDAHULUAN

Pembangunan pada saat ini telah berkembang sangat pesat di Indonesia. Seperti sekarang ini, pemerintah kebanyakan lebih memfokuskan pembangunan hanya pada perkotaan saja, namun seiring berjalannya waktu itu mulai berubah. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan kelompok-kelompok, seperti program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan desa yang dapat

menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah dan kaum perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. PKK ini lebih diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui program-program yang dijalankan. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi :

“Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selanjutnya disingkat gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, kesadaran hukum dan lingkungan”.

Gerakan PKK yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggerak utama untuk menuju terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera, mandiri. Peningkatan kualitas perempuan melalui program pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan tersebut. Gerakan ini dibentuk untuk memperdayakan perempuan agar dapat menjadi perempuan yang mandiri. Sebagian orang berpikir PKK hanya melakukan kegiatan seperti arisan, persepsi inilah yang sering muncul didalam benak para suami tak jarang seorang suami melarang istrinya untuk ikut PKK padahal dalam prakteknya PKK memberikan peran besar dalam pengembangan perempuan.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. (Sarwono, 2015:215)

Peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, sistem norma dan budaya organisasi sehingga strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*. Soekanto (2004:239-240), menjelaskan bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan atau status. Peranan adalah suatu aspek interaksi sosial dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dalam badan hukum menjadi aktivitas perilaku atau melaksanakan usaha-usaha yang sesuai dengan kedudukannya.

Hartono dan Hunt (1996:118) mengungkapkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Lebih lanjut lagi dikatakan: Peran (*role*) merupakan perilaku yang di harapkan dari individu atau kelompok yang mempunyai suatu status. Seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki status dan

diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu peran dan status adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan hak-hak tersebut.

Desa dan Kelurahan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkan kembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

Fungsi peran PKK sebagai fasilitator dan penyuluh dalam mendukung program-program pemerintah. Tujuan PKK dalam kurun waktu ke waktu akan mendorong peningkatan kemandirian Gerakan PKK dalam keluarga dan masyarakat di lingkungannya melalui pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK, sedangkan dalam kurun waktu yang relatif pendek akan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK yang merata di semua jenjang, serta meningkatkan mutu pengorganisasian Gerakan PKK dan kapasitas Gerakan PKK baik di desa dan maupun di kota dengan kader-kader yang handal dan berkualitas, serta meningkatkan kemitraan dalam pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

PKK menjadi gerakan untuk membantu dan mendukung program-program pemerintah dengan aspek yang dilakukan seperti mendata warga, ibu hamil, bayi dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat. PKK juga harus menembus pemahaman agama yang kurang tepat, tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi termasuk mereka harus memberikan penjelasan yang utuh tentang manfaat program KB kepada masyarakat. Program kerja PKK berorientasi pada praksis, artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan.

Pemberdayaan masyarakat akan terwujud bila ada upaya untuk memberdayakan keluarga. Maksud dari pemberdayaan keluarga adalah “segala upaya yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan mengambil keputusan untuk melakukan pemecahan dengan benar, tanpa atau dengan bantuan pihak lain”. (Panduan Pemberdayaan Masyarakat, 1999: 2).

Dikeluarkannya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2007 tentang pemberdayaan masyarakat

dan Desa atau Kelurahan maka PKK memiliki peran yang sangat berarti dalam masyarakat yang ada desa maupun kelurahan dengan melakukan pemberdayaan oleh karena itu, PKK dibentuk untuk menumbuhkan, menghimpunkan, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. Jika suatu masyarakat ingin maju diharapkan terjadi perubahan terutama perubahan dalam aspek pembangunan yang direncanakan dengan tujuan mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Saat ini pembangunan disebut sebagai perubahan yang ke arah modernisasi yang lebih ke pengetahuan dan teknologi yang maju. Maka dari itu pembangunan sebagai usaha untuk menciptakan perubahan secara modernisasi.

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses yang menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (*growth*) ataupun perubahan (*change*) dalam kehidupan bersama atau organisasi sosial dan budaya. Sedangkan pembangunan desa ini memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana yang akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa.

Pada Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Menurut Keith Davis (1990) dalam bukunya "*Human Relational Work*" mengatakan bahwa "*participation is defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*" (partisipasi dapat di definisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan).

Ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan seperti yang disampaikan Sofiani (2009) dapat dilihat dari peran perempuan sebagai pelaku, pengendali, pengambil keputusan, penasehat dan penerima manfaat pembangunan. Partisipasi mengandung makna adanya keterlibatan khususnya masyarakat dalam tahap-tahap kegiatan pembangunan baik secara mental dan emosi

seseorang didalam kelompok yang mendorong orang tersebut untuk berperan dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian tujuan kelompok.

Perempuan, terutama dari kalangan miskin seringkali menjadi penerima informasi kedua karena tidak pernah terlibat dalam rembug-rembug yang diselenggarakan untuk memecahkan permasalahan masyarakat. Memang di beberapa tempat kehadiran perempuan dalam penentuan keputusan terjadi walaupun jumlahnya relatif kecil, akan tetapi seringkali suaranya kalah dengan suara laki-laki yang jumlahnya cukup besar, bahkan kadang-kadang mereka hanya ikut hadir tetapi tidak bisa memberikan suaranya. Padahal rembug-rembug yang dilakukan warga merupakan aset yang besar sebagai modal sosial untuk melibatkan masyarakat dalam proses memecahkan persoalan kehidupan mereka. Kondisi ini seringkali berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang pada gilirannya dapat berakibat adanya kebijakan-kebijakan yang tidak memihak pada kebutuhan perempuan.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan di daerah mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah baik. Masyarakat secara mandiri dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi dan menyusun program usulan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi objektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Tjokroamidjojo (1996) bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut: (1) Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja, dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah, (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain, (3) Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Untuk itu menjadi strategis ketika melibatkan perempuan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi (PNPM, 2008). Hal ini disebabkan: (1) Sebagai penghargaan terhadap perempuan sebagai manusia yang merdeka yang berhak untuk menentukan pemecahan masalah yang dihadapinya; (2) Pemecahan masalah-masalah, termasuk masalah kemiskinan yang

menyangkut perempuan akan lebih tepat apabila dibicarakan bersama dengan perempuan; (3) Memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai manusia; (4) Potensi yang besar yang dimiliki oleh perempuan, akan sangat berarti apabila digunakan bukan hanya untuk sektor domestik akan tetapi juga dalam sektor publik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; (5) Keterlibatan dalam semua proses pembangunan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama.

Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan ialah dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas atau kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan (Sofyan, 2003). Langkah ini akan terealisasi ketika perempuan mendapat ruang dalam aspek-aspek kegiatan baik dalam peran domestik maupun publik. Adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berperan akan menghasilkan manfaat yang besar karena mereka bisa saling mendukung sesuai dengan potensi masing-masing yang dimiliki baik perempuan maupun laki-laki.

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang diungkapkan oleh Vivekananda (Darwin 2005:8) bahwa: negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa perempuan baik sebagai warga negara mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Peran perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No.6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa.

Kwadengan Barat menjadi salah satu desa yang berusaha untuk menggerakkan partisipasi masyarakatnya dengan melibatkan wadah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sejak berdirinya PKK di desa Kwadengan Barat hingga sampai saat ini menjadi salah satu desa di Lemah Putro yang terus melaksanakan program PKK, dan terus memberdayakan perempuan lewat program di dalamnya, dengan tujuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa.

Organisasi PKK di Kelurahan Lemah Putro ini berperan dalam meningkatkan kemajuan wanita terutama desa Kwadengan Barat RT 02 seperti penyuluhan tentang Panca Darma Wanita, membina Simulasi gender

dilaksanakan pada setiap bulan, mengadakan latihan keterampilan, mengadakan penyuluhan dan mengadakan sosialisasi. Dalam melaksanakan kegiatan PKK ini memberikan kontribusi yang positif terhadap wanita sebagai ibu rumah tangga. Melalui PKK wanita dapat mengaktualisasikan dirinya untuk aktif, selain perannya sebagai ibu rumah tangga.

Kegiatan PKK yang sering dilakukan yaitu turut berperan dalam membangun dunia pendidikan khususnya pada Pendidikan Usia Dini (PAUD), bidang kesehatan PKK dituntut menghidupkan Posyandu dan membantu ibu yang melahirkan dan yang akan melahirkan sehingga mengurangi angka kematian ibu dan anak saat proses persalinan, di bidang ekonomi diharapkan PKK dapat membantu usaha kecil menengah yang dilakukan kaum ibu. Hal terpenting yaitu menyiapkan kader-kader PKK di setiap perkampungan agar menciptakan desa yang maju dan sejahtera.

PKK di Desa Kwadengan Barat sudah berjalan baik, hanya saja sebagian masyarakat kurang aktif tidak mau melibatkan diri atau berpartisipasi, mereka sering diam diri di dalam rumah. Maka dari itu PKK harus lebih berusaha lagi agar masyarakat terutama perempuan di desa tersebut ikut serta dalam organisasi ini untuk memajukan desanya. Desa yang maju di dalamnya terdapat masyarakat yang berperan aktif untuk memajukan desanya. Dan juga pengurus PKK lebih meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan kegiatan PKK terutama dalam menghimpun dan membina keluarga agar masyarakat lebih antusias untuk mengikuti segala kegiatan PKK dalam mendukung program-program pemerintah di Kota Sidoarjo.

Dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Teori Peran Biddle and Thomas. Menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2013:215), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut: (1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, (2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, (3) Kedudukan orang-orang dalam berperilaku, (4) Kaitan antar orang dan perilaku. Menurut Biddle dan Thomas terdapat lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yaitu *expectation*, *norm*, *performance*, *evaluation* dan *saction*.

Dengan demikian *expectation*, *norm*, *performance*, *evaluation* dan *sanction* saling berkaitan dalam perilaku peran. Harapan dan norma merupakan segala sesuatu yang berisi harapan atau keinginan masyarakat tentang perilaku yang menyertai suatu peran. Kemudian munculah wujud perilaku sebagai realisasi dari harapan dan norma tersebut sehingga timbulah penilaian dan sanksi terhadap perilaku yang telah diwujudkan tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:8) metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan instrumen penelitian dalam mengumpulkan data-data yang berupa angka yang kemudian data-data tersebut akan digambarkan melalui informasi kuantitatif dan nantinya akan ditarik kesimpulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan peran PKK dalam menggerakkan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo. Alasan memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian karena Desa tersebut terdapat organisasi PKK yang masih aktif sampai sekarang daripada organisasi PKK di Desa sekitar Kwadengan Barat.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perempuan dewasa yang sudah menikah di Kwadengan Barat yang berjumlah 99 orang. Bila populasi keseluruhan subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan sampel penelitian ini berdasarkan populasi seluruh perempuan dewasa yang sudah menikah di Kwadengan Barat yang berjumlah 99 orang. Bila populasi keseluruhan subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dikarenakan penelitian ini jumlah populasinya kurang dari angka 100, maka sampel yang digunakan adalah seluruh jumlah populasi yang berjumlah 99 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling: proportionate stratified random sampling*. Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peran PKK dalam menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo. Dalam hal ini digambarkan bagaimanakah program PKK dalam menjalankan perannya untuk menggerakkan perempuan agar berpartisipasi dalam pembangunan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket yang diambil berupa data yang diambil guna menjawab rumusan

masalah tentang pelaksanaan peran PKK dalam menggerakkan partisipasi perempuan di Desa Kwadengan Barat.

Data diperoleh dengan melakukan penyebaran angket diberikan pada 99 orang. Penyebaran angket dilakukan oleh peneliti secara langsung, tanpa melalui perantara dengan cara membagikan *hardfile* angket yang telah dibuat, kemudian hasil jawaban dari responden yang terdapat pada lembar angket dikumpulkan kembali di hari yang sama untuk diolah hasilnya oleh peneliti.

Setiap jawaban yang diberikan memiliki skor. Adapun penentuan skor dalam angket, sesuai tabel 1

Tabel 1. Pedoman penskoran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1.	Selalu (SL)	4
2.	Sering (SR)	3
3.	Kadang-kadang (KK)	2
4.	Tidak pernah (TP)	1

Kisi-kisi angket digunakan sebagai acuan untuk membuat pernyataan dalam angket, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang dimaksud. Berikut kisi-kisi angket yang digunakan dalam penelitian, indikator pertama yaitu harapan, dalam indikator harapan terdapat tiga sub indikator yaitu (a) Merencanakan program dan kegiatan; (b) Melaksanakan program kegiatan; (c) Mengevaluasi program dan kegiatan, dalam indikator norma terdapat dua sub indikator, yaitu (a) Mengatur sistem dalam masyarakat; (b) Petunjuk perilaku yang benar, dalam indikator wujud perilaku terdapat dua sub indikator, yaitu (a) Melaksanakan tanggung jawab terhadap tugas; (b) Taat terhadap peraturan, dalam indikator penilaian dan sanksi terdapat dua sub indikator, yaitu (a) Memberikan saran atau kritik terhadap peran PKK; (b) Pemberian *reward* dan *punishment*.

Setelah angket disusun maka angket perlu diuji terlebih dahulu untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelemahan angket yang akan disebar kepada responden dan untuk mengetahui sejauh mana responden mengalami kesulitan di dalam menjawab pernyataan tersebut serta untuk mengetahui apakah angket tersebut memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

Uji validitas instrumen dilakukan untuk menunjukkan keabsahan dari butir-butir pernyataan dalam instrumen yang akan digunakan untuk pengambilan data. Menurut Sugiyono (2016:267) validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah. Pengertian

validitas tersebut menunjukkan kesesuaian dan ketepatan alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas pernyataan dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi *product moment*. Adapun korelasi *Product Moment* adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

N = Jumlah responden

x = Skor butir pernyataan

y = Skor total

xy = Skor pernyataan dikalikan skor total

x² = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x

y² = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y

Hasil perhitungan dari r_{xy} dikonsultasikan dengan nilai r tabel dengan taraf signifikan 10%. Penggunaan r tabel harus disesuaikan dengan jumlah responden yang digunakan dalam penelitian, rumus sederhana yang digunakan untuk menentukan r tabel adalah df = (N-2), karena dalam penelitian ini jumlah responden sebanyak 99 sehingga dapat diketahui bahwa df = (99-2), df = 97. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa r tabel untuk taraf signifikansi 10% adalah 0,1663. Instrumen penelitian berupa kuesioner (angket) yang berisikan pernyataan dapat dikatakan valid apabila hasil r hitung > r tabel. Sehingga setiap item pernyataan yang memiliki hasil perhitungan validitas > 0,1663 (lebih dari 0,1663), maka dianggap valid. Sedangkan item pernyataan yang memiliki hasil perhitungan validitas < 0,1663 (kurang dari 0,1663), maka dianggap tidak valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketetapan suatu instrumen dalam mengukur gejala yang sama walaupun dalam waktu yang berbeda. Menurut Sugiyono (2016:268) reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur sama. Hasil pengukuran yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi maka mampu memberikan hasil yang terpercaya. Menguji reliabilitas instrumen digunakan rumus Alpha, rumus ini digunakan karena angket yang dipakai dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan jawaban yang bernilai satu atau nol. Menurut Sugiyono (2016:184) rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan

0 dan 1, misalnya angket atau soal uraian. Adapun teknik mencari reliabilitas menggunakan rumus :

$$r_{1.1} = \frac{2 \cdot r_{xy}}{1 + |r_{xy}|}$$

Keterangan:

r_{1.1} = Reliabilitas instrumen

r_{xy} = Validitas soal keseluruhan

Menurut Arikunto (2010) hasil reliabilitas pernyataan dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria berikut:

0,80 – 1,00 = reliabilitas sangat tinggi

0,61 – 0,80 = reliabilitas tinggi

0,41 – 0,60 = reliabilitas cukup

0,21 – 0,40 = reliabilitas rendah

0,00 – 0,20 = reliabilitas sangat rendah

Setelah dilakukan pengukuran maka skor yang dihasilkan dinamakan skor yang diperoleh, sedangkan selisih antara skor yang sebenarnya dengan skor yang diperoleh dinamakan error. Semakin kecil angka error yang dihasilkan, maka akan semakin reliabel instrumen penelitian. Uji validitas dan reliabilitas dapat menunjukkan nilai kepercayaan/keandalan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Sehingga keabsahan hasil data yang telah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini diperoleh hasil sebesar 0,450. Karena hasil uji reliabilitas lebih besar daripada r tabel (0,1663), maka dapat dikatakan bahwa instrumen dalam penelitian ini reliabel, dengan kategori cukup.

Setelah penyebaran angket dilakukan dan lembar jawaban telah diterima oleh peneliti, maka tiap jawaban dari responden diberi skor sesuai dengan acuan pada tabel 1. Skor pada tiap butir pernyataan dijumlahkan untuk mengetahui skor total. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan interval, yaitu:

$$i = \frac{(Xi - Xr) + 1}{Ki}$$

Keterangan:

i = interval

Xi = jumlah skor paling tinggi yang diperoleh

Xr = jumlah skor paling rendah yang diperoleh

Ki = kelas interval (banyaknya kategori yang diinginkan)

Dalam penelitian ini diketahui bahwa jumlah seluruh pernyataan yang valid adalah 32 butir, sehingga skor terendah dari angket pelaksanaan peran PKK dalam menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo adalah 32, sedangkan skor tertinggi adalah 128. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus interval sebagai berikut:

$$i = \frac{(Xi - Xr) + 1}{Ki}$$

$$i = \frac{(128 - 32) + 1}{3}$$

$$i = \frac{96 + 1}{3}$$

$$i = \frac{97}{3}$$

$$i = 32,3$$

Berdasarkan penghitungan menggunakan rumus interval di atas, diketahui panjang kelas adalah 32,3 yang dibulatkan menjadi 32, maka diperoleh kategori penskoran sebagai berikut.

Tabel 2. Pelaksanaan Peran PKK Dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat

No.	Interval Skor	Kategori
1.	96-127	Baik
2.	64-95	Cukup baik
3.	32-63	Kurang baik

Sumber: Data Primer, diolah 2020

Setelah ditentukan kategori penskoran, selanjutnya adalah menganalisis skor pada tiap-tiap indikator, dari skor indikator yang diperoleh akan dicari rata-rata skor pada tiap indikator, dan selanjutnya dari data rata-rata skor tiap indikator akan diperoleh rata-rata skor pelaksanaan peran PKK dalam menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat di desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo apakah masuk dalam kategori baik, cukup baik, dan kurang baik. Sedangkan untuk mengetahui kriteria pada tiap indikator pasti memiliki interval yang berbeda-beda, hal ini bergantung pada banyaknya pernyataan di setiap indikator penelitian. Berikut adalah data jumlah pernyataan perindikator yang valid:

Pada indikator harapan terdapat 12 butir pernyataan, sehingga dapat diketahui nilai tertinggi dari kuesioner (angket) terkait indikator harapan adalah 48 sedangkan nilai terendahnya adalah 12. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus interval sebagai berikut:

$$i = \frac{(Xi - Xr) + 1}{Ki}$$

$$i = \frac{(48 - 12) + 1}{3}$$

$$i = \frac{36 + 1}{3}$$

$$i = \frac{37}{3}$$

$$i = 12,3 \text{ dibulatkan } 12$$

Pada indikator norma terdapat 8 butir pernyataan, sehingga dapat diketahui nilai tertinggi dari kuesioner (angket) terkait indikator norma adalah 32 sedangkan nilai terendahnya adalah 8. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus interval sebagai berikut:

$$i = \frac{(Xi - Xr) + 1}{Ki}$$

$$i = \frac{(32 - 8) + 1}{3}$$

$$i = \frac{24 + 1}{3}$$

$$i = \frac{25}{3}$$

$$i = 8,3 \text{ dibulatkan } 8$$

Pada indikator wujud perilaku terdapat 8 butir pernyataan, sehingga dapat diketahui nilai tertinggi dari kuesioner (angket) terkait indikator wujud perilaku adalah 32 sedangkan nilai terendahnya adalah 8. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus interval sebagai berikut:

$$i = \frac{(Xi - Xr) + 1}{Ki}$$

$$i = \frac{(32 - 8) + 1}{3}$$

$$i = \frac{24 + 1}{3}$$

$$i = \frac{25}{3}$$

$$i = 8,3 \text{ dibulatkan } 8$$

Pada indikator penilaian sanksi terdapat 5 butir pernyataan, sehingga dapat diketahui nilai tertinggi dari kuesioner (angket) terkait indikator penilaian sanksi adalah 20 sedangkan nilai terendahnya adalah 5. Kemudian nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus interval sebagai berikut:

$$i = \frac{(Xi - Xr) + 1}{Ki}$$

$$i = \frac{(20 - 5) + 1}{3}$$

$$i = \frac{15 + 1}{3}$$

$$i = \frac{16}{3}$$

$$i = 5,3 \text{ dibulatkan } 5$$

Tabel 3. Kriteria Penskoran pada Tiap Sub Indikator

Kategori	Interval			
	Indikator Harapan	Indikator Norma	Indikator Wujud Perilaku	Indikator Sanksi
Baik	36-47	24-31	24-31	15-19
Cukup	24-35	16-23	16-23	10-14
Kurang	12-23	8-15	8-15	5-9

Sumber: Data Primer, diolah 2019

Setelah dikategorikan, hasil dari pengkategorian akan dipersentasekan sebagai bentuk gambaran keadaan sampel dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan yang menjelaskan Pelaksanaan Peran PKK Dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan Dalam

Pembangunan Masyarakat. Adapun rumus persentase yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

$$P = \frac{N}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = persentase hasil akhir

N = nilai yang diperoleh dalam angket

n = jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Anggota dari PKK adalah ibu-ibu yang telah berumah tangga. Dengan keanggotaan perempuan atau ibu-ibu dalam PKK maka diharapkan perempuan dapat terberdayakan sehingga mampu membantu kesejahteraan keluarganya.

PKK merupakan gerakan masyarakat bermula dari seminar Home Economic di Bogor pada tahun 1957, menghasilkan rumusan 10 (sepuluh) segi kehidupan keluarga kemudian ditetapkan kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga yang diajarkan sekolah-sekolah dan pendidikan masyarakat. Kemudian ditindak lanjuti oleh Kementerian Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan pada tahun 1961 yang menetapkan sepuluh segi kehidupan keluarga sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga yang diajarkan disekolah-sekolah dan pendidikan (PENMAS) sampai sekarang.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh atau pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas dan isteri kepala daerah s.d tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada tanggal 27 Desember 1972 Mendagri mengeluarkan Surat Kawat No. SUS 3/6/12 yang menyatakan bahwa pendidikan dalam PKK dirubah menjadi pembinaan dan dilaksanakan diseluruh Indonesia, selanjutnya tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai hari Kesatuan Gerakan PKK.

Namun tidak hanya itu PKK juga mempunyai visi dan misi. Visinya Terwujudnya keluarga beriman yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, mandiri berkesetaraan dan berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan lingkungan. Sedangkan misinya (1) Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan dan kewajiban dengan kewajiban dengan hak asasi manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong-

royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi, seimbang; (2) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga; (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta peningkatan pemanfaatan pekarangan, sandang dan penataan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat; (4) Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupannya dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.

PKK mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi merencanakan program-program serta kegiatan untuk menggerakkan perempuan. PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan juga merupakan suatu gerakan yang bersifat sosial ekonomi yang berorientasi pada usaha pembinaan individu untuk menimbulkan kesadaran kepada segi-segi kehidupan didalam keluarga.

Program PKK pada disesuaikan dengan Pedoman Umum baru Tim Penggerak PKK di dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK, telah melakukan pembenahan-pembenahan kesekretariatan dan pembinaan langsung ke setiap Kecamatan dan Kelurahan. Adapun program PKK yang harus diperhatikan yaitu: (1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, (2) Gotong Royong, (3) Pangan, (4) Sandang, (5) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, (6) Pendidikan dan Keterampilan, (7) Kesehatan, (8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, (9) Lingkungan Hidup, (10) Perencanaan Sehat.

Kesepuluh pokok program PKK ini saling berhubungan, saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang mendasarkan pada kesejahteraan keluarga, meliputi sandang, pangan, perumahan, keuangan atau berkoperasi, kesehatan dan keamanan. Untuk itu segala sumber yang ada dalam keluarga harus ditatalaksanakan yang berarti segala aktivitas keluarga direncanakan terlebih dahulu. Pelaksanaan tatalaksana untuk mencapai tujuan yang diinginkan harus bekerja sama antar anggota keluarga dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga perlu adanya penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong dengan cara memberikan pendidikan dan ketrampilan bagi keluarga.

Peranan PKK merupakan segala macam tindakan yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan ketrampilan yang banyak dilakukan mulai dari hidup sehat, pendidikan keluarga yang dimulai dari lingkungan terbawah Rumah

Tangga (RT) hingga Desa dan kelurahan. Peran PKK sangat penting bagi pemerintah karena merupakan penengak utama antara negara dan wanita desa. Bahkan dalam struktur organisasi berada di bawah naungan departemen dalam negeri, dan ketuanya di tingkat desa adalah istri kepala desa.

Dimasa saat ini kaum perempuan di Indonesia seolah-olah telah mendapatkan energi baru yang jauh lebih besar, dimana peran dan fungsi mereka di tengah-tengah masyarakat menjadi semakin terbuka lebar. Pemerintah dalam meningkatkan kualitas perempuan diupayakan melalui program pemberdayaan perempuan yang pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan dirinya bisa memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan dan berperan aktif dalam pembangunan, sehingga dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Salah satu upaya pemerintah untuk terus mengembangkan kemampuan maupun pengetahuan perempuan adalah dengan dibentuknya PKK sebagai wadah untuk para perempuan mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan serta mendorong kemandirian para perempuan atau bisa disimpulkan bahwa PKK merupakan organisasi yang menjadi wadah dalam membina keluarga bermasyarakat baik dipertanian maupun dipedesaan yang dapat menghasilkan sinergi untuk keluarga sejahtera pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

Keberhasilan PKK ini terwujud karena gerakan ini dimunculkan dari kebutuhan masyarakat yang pengelolaannya juga dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya dapat dinikmati langsung atau ditujukan untuk masyarakat itu sendiri. Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan wanita dari belenggu budaya patriarkhi, sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK diharapkan harkat dan martabat wanita sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan. Namun, pada kenyataannya PKK belum sepenuhnya mampu merubah kondisi keluarga dan perempuan.

Perempuan mempunyai peran besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu perempuan juga mempunyai peran besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok yaitu dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin maka dibentuk gerakan PKK yang

mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh suatu Tim PKK.

Kaum perempuan kini semakin menyadari bahwa wanita sebagai salah satu kekuatan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang tidak kalah pentingnya dengan kekuatan masyarakat lainnya, dan karenanya mempunyai tanggung jawab bersama melakukan perannya dalam masa pembangunan. Salah satu gerakan perempuan di Indonesia yang saat ini masih aktif berperan aktif adalah PKK.

Pelaksanaan Peran PKK dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo ditinjau dari tiga indikator, yaitu harapan, norma, wujud perilaku, dan penilaian sanksi yang digunakan sebagai acuan apakah pelaksanaan peran PKK dalam menggerakkan perempuan menunjukkan suatu peran yang baik, cukup baik, atau kurang baik. Berikut rincian hasil dari penelitian terkait Pelaksanaan Peran PKK dalam Menggerakkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo.

Indikator pertama, yaitu harapan. Harapan pada umumnya tentang bagaimana orang tersebut bisa merencanakan program kegiatan, melaksanakan program kegiatan dan mengevaluasi program kegiatan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakatnya. Terdiri dari 12 pernyataan, sehingga skor terendah yang diperoleh adalah 12 dan skor tertinggi adalah 47. Setelah skor terendah dan tertinggi dimasukkan ke dalam rumus interval, diperoleh panjang kelas sebesar 12,33 yang dibulatkan menjadi 12. Adapun data yang dihasilkan sesuai tabel 4.

Tabel 4. Hasil Persentase pada indikator harapan

No.	Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1.	36-47	Baik	0	0%
2.	24-35	Cukup Baik	42	42,42%
3.	12-23	Kurang Baik	57	57,58%
Jumlah			99	100%
Skor rata-rata			3006 : 99 = 30,36	

Sumber: Data Primer, diolah 2020

Pada tabel 4 diketahui bahwa, dari 99 orang yang menjadi responden, terdapat 42 orang atau persentase sebesar 42,42% dalam kategori cukup baik. Kemudian terdapat 57 orang atau persentase sebesar 57,58% dalam kategori kurang baik. Dan tidak terdapat responden yang termasuk kategori kurang baik.

Jawaban dari responden dalam indikator harapan memiliki jumlah skor sebanyak 3006, dengan demikian diperoleh rata-rata sebesar 30,36 yang tergolong dalam kategori kurang baik. Jika dilihat dari skor rata-rata yang

tergolong dalam kategori kurang baik dan jumlah persentase kategori tertinggi adalah kategori kurang baik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan peran PKK pada indikator harapan menunjukkan suatu harapan yang kurang baik.

Indikator kedua yaitu norma. Norma adalah salah satu bentuk harapan yang menyertai suatu peran dan merupakan suatu tuntunan peran (*role deman*). Tuntunan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan. Pada umumnya tentang bagaimana PKK bisa mengatur sistem dalam masyarakatnya dan sebagai petunjuk perilaku yang pantas ditunjukkan oleh seorang yang mempunyai peran tersebut. Terdiri dari 8 pernyataan, sehingga skor terendah yang diperoleh adalah 8 dan skor tertinggi adalah 31. Setelah skor terendah dan tertinggi dimasukkan ke dalam rumus interval, diperoleh panjang kelas sebesar 8,33 yang dibulatkan menjadi 8. Adapun data yang dihasilkan sesuai tabel 4

Tabel 5. Hasil persentase pada indikator norma

No.	Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1.	24-31	Baik	0	0%
2.	16-23	Cukup baik	96	96,97%
3.	8-15	Kurang baik	3	3,03%
Jumlah			99	100%
Skor rata-rata			2363 : 99 = 23,86	

Sumber: Data Primer, diolah 2020

Pada tabel 5 diketahui bahwa, dari 99 orang yang menjadi responden, terdapat 96 orang atau persentase sebesar 96,97% dalam kategori cukup baik. Kemudian terdapat 3 orang atau persentase sebesar 3,03% dalam kategori kurang baik Dan tidak terdapat responden yang termasuk kategori baik.

Jawaban dari responden dalam indikator norma memiliki jumlah skor sebanyak 2363, dengan demikian diperoleh rata-rata sebesar 23,86 yang termasuk dalam kriteria cukup baik. Jika dilihat dari skor rata-rata yang tergolong dalam kategori cukup baik dan jumlah persentase kategori tertinggi adalah kategori cukup baik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan peran PKK pada indikator norma dalam pelaksanaan peran PKK menunjukkan suatu norma yang cukup baik.

Indikator yang ketiga yaitu wujud perilaku. Wujud perilaku yang dimaksud adalah perwujudan perilaku secara nyata dalam suatu peran oleh aktor kepada target sasaran. Pada umumnya tentang bagaimana melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan serta taat terhadap peraturan yang sudah dibuat. Terdiri dari 8 pernyataan, sehingga skor terendah yang diperoleh adalah 8 dan skor tertinggi adalah 32. Setelah skor terendah dan tertinggi

dimasukkan ke dalam rumus interval, diperoleh panjang kelas sebesar 8,33 yang dibulatkan menjadi 8. Adapun data yang dihasilkan sesuai tabel 5

Tabel 6. Hasil persentase pada indikator wujud perilaku

No.	Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1.	24-31	Baik	0	0%
2.	16-23	Cukup baik	99	100%
3.	8-15	Kurang baik	0	0%
Jumlah			99	100%
Skor rata-rata			2680 : 99 = 27,07	

Sumber: Data Primer, diolah 2020

Pada tabel 6 diketahui bahwa, dari 99 orang yang menjadi responden, terdapat 99 orang atau persentase sebesar 100% dalam kategori cukup baik. Dan tidak terdapat responden yang termasuk kategori baik dan kategori kurang baik.

Jawaban dari responden dalam indikator wujud perilaku memiliki jumlah skor sebanyak 2680, dengan demikian diperoleh rata-rata sebesar 27,07 yang tergolong dalam kategori cukup baik. Jika dilihat dari skor rata-rata yang tergolong dalam kategori cukup baik dan jumlah persentase kategori tertinggi adalah kategori cukup baik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan peran PKK pada indikator wujud perilaku dalam pelaksanaan peran PKK menunjukkan suatu wujud perilaku yang cukup baik

Indikator keempat, yaitu penilaian sanksi. Penilaian dan sanksi adalah segala sesuatu yang didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma. Berdasarkan norma tersebut orang memberikan penilaian berupa kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan nilai positif agar perwujudan perilaku dalam peran di ubah sedemikian rupa sesuai dengan harapan dan norma di masyarakat. Bila suatu saat tidak bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik maka sanksi yang sudah disetujui akan diberlakukan. Terdiri dari 5 pernyataan, sehingga skor terendah yang diperoleh adalah 5 dan skor tertinggi adalah 19. Setelah skor terendah dan tertinggi dimasukkan ke dalam rumus interval, diperoleh panjang kelas sebesar 5,33 yang dibulatkan menjadi 5. Adapun data yang dihasilkan sesuai tabel 6

Tabel 7. Hasil persentase indikator penilaian sanksi

No.	Skor	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1.	15-19	Baik	99	100%
2.	10-14	Cukup baik	0	0%
3.	5-9	Kurang baik	0	0%
Jumlah			99	100%

Skor rata-rata	1810 : 99 = 18,28
----------------	-------------------

Sumber: Data Primer, diolah 2020

Pada tabel 7 diketahui bahwa, dari 99 orang yang menjadi responden, terdapat 99 orang atau persentase sebesar 100% dalam kategori baik. Dan tidak terdapat responden yang termasuk kategori cukup baik dan kategori kurang baik.

Jawaban dari responden dalam indikator penilaian sanksi memiliki jumlah skor sebanyak 1810, dengan demikian diperoleh rata-rata sebesar 18,28 yang tergolong dalam kategori baik. Jika dilihat dari skor rata-rata yang tergolong dalam kategori baik dan jumlah persentase kategori tertinggi adalah kategori baik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan peran PKK pada indikator penilaian sanksi dalam pelaksanaan peran PKK menunjukkan suatu penilaian sanksi yang cukup baik.

Pembahasan

Hasil data diperoleh melalui angket yang dihasilkan, akan dideskripsikan melalui bentuk persentase dalam suatu tabel. PKK merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan desa yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah dan kaum perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. PKK ini lebih diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa melalui program-program yang dijalankan.

Peran (*role*) merupakan perilaku yang di harapkan dari individu atau kelompok yang mempunyai suatu status. Seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu peran dan status adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan hak-hak tersebut. Kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) merupakan unsur-unsur dalam lapisan masyarakat yang memiliki arti penting dalam sistem sosial. Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakat dan tingkah laku individu tersebut. Seseorang memiliki kedudukan (*status*) dan melaksanakan peranannya sesuai hak dan kewajiban maka telah diberikan atas kedudukannya atau statusnya didalam suatu organisasi sehingga peran yang di mainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan komponen orang itu untuk bekerja.

Desa dan Kelurahan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam

meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

Peranan PKK tersebut sejalan dengan visi dan misi PKK, dan didukung dengan sepuluh program pokok yang dimiliki PKK, kemudian lebih dikenal sebagai “Sepuluh Program Pokok PKK”, dengan sepuluh program pokok PKK tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa PKK memiliki agenda dan tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin mencapai kemajuan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi dambaan setiap keluarga. Supaya dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka PKK membentuk Pokja dengan spesifikasi penanganan yang khusus. Pokja-pokja tersebut berjalan seiring dan saling melengkapi sehingga koordinasi di antara keempat pokja tersebut sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Adapun 10 program yang dimiliki oleh PKK, yaitu penghayatan dan pengalaman pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Gerakan PKK yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggerak utama untuk menuju terwujudnya keluarga yang bahagia, sejahtera, mandiri. Peningkatan kualitas perempuan melalui program pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan tersebut. Gerakan ini dibentuk untuk memperdayakan perempuan agar dapat menjadi perempuan yang mandiri.

Pada setiap perencanaan pembangunan diperlukan adanya suatu kontribusi berupa pemikiran ide-ide, pendapat, kritik maupun saran secara sukarela dari masyarakat untuk suatu pembangunan. Sehingga di setiap pengambilan keputusan adanya suatu sosialisasi dari masyarakat juga harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya juga masyarakat harus melibatkan diri dalam pembangunan khusus dalam hal ini pembangunan infrastruktur jalan baik dalam bentuk finansial maupun tenaga dari masyarakat sangat penting dalam setiap pembangunan sehingga dengan adanya peran dari masyarakat akan menjawab tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bahwa perempuan baik sebagai warga negara mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Perempuan memiliki berbagai posisi strategis untuk mendukung kegiatan pembangunan dalam berbagai lapangan kehidupan seperti dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, politik, budaya, lingkungan dan sebagainya. Perempuan menjadi subjek dalam pengelolaan pembangunan adalah sebuah keharusan, karena pembangunan mengatur kebutuhan dan peningkatan hidup baik laki-laki maupun perempuan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai sebuah proses mengidentifikasi, merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan. Masing-masing tahapan ini perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat baik itu pikiran, tenaga, maupun ketetapan hasil pembangunan dengan kebutuhan perempuan.

Kontribusi perempuan dalam mensejahterakan kehidupan keluarga sangat besar. Selain menjadi pengelola urusan rumah tangga, perempuan juga dituntut untuk membantu dalam mencari nafkah demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Selain itu, perempuan juga berperan sebagai pelaku pembangunan. Perempuan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan memiliki peran penting untuk membangun bangsa dan negaranya karena perempuan adalah motor penggerak dari pembangunan itu sendiri. Dengan demikian perlu diadakan pembinaan terhadap perempuan agar mereka mampu menjalankan peran gandanya dengan baik, seperti adanya PKK ini.

Banyak upaya yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan di Indonesia dalam pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dalam bidang organisasi untuk menunjang program peningkatan peranan perempuan Indonesia dalam pembangunan, pemerintah telah membentuk berbagai organisasi perempuan yang secara garis besar dikategorikan menjadi: (1) para istri pegawai negeri dikelompokkan dalam Dharma Perempuan; (2) para istri anggota ABRI dikelompokkan dalam Dharma Pertiwi; (3) para ibu rumah tangga di daerah pedesaan dan di kota yang bukan istri pegawai negeri atau istri ABRI diciptakan organisasi PKK sebagai salah satu organisasi perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan Indonesia dalam pembangunan, (Nursyahbani Katjasungkana 1989:41, dalam Soetrisno 1997:68).

Pemerintah dalam hal ini juga diharapkan agar lebih memperhatikan di setiap kegiatan PKK dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan PKK. Kedua, Perlunya peningkatan kegiatan penyuluhan agar terwujudnya taraf hidup masyarakat Desa Kwadengan yang layak, dengan memberikan informasi penting tentang perkembangan masalah yang sedang terjadi dan memotivasi serta menggerakkan masyarakat agar lebih produktif dan efisien guna untuk kesejahteraan keluarga, dengan dibantu oleh pemerintah melalui dinas-dinas atau lembaga-lembaga sebagai narasumber, untuk memberikan solusi dan meningkatkan minat keluarga berpartisipasi dalam pembangunan.

Jika ada PKK di suatu tempat ini terwujud karena gerakan ini dimunculkan dari kebutuhan masyarakat yang pengelolaannya juga dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya dapat dinikmati langsung atau ditujukan untuk masyarakat itu sendiri. Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan wanita dari belenggu budaya patriarkhi, sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK diharapkan harkat dan martabat wanita sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan. Namun, pada kenyataannya PKK belum sepenuhnya mampu merubah kondisi keluarga dan wanita.

Tanpa ada sumber daya manusia yang mumpuni, desa akan kekurangan tenaga yang bisa mengakibatkan melambatnya perkembangan yang dialami desa. Bahkan sumber daya manusia akan jauh lebih menghasilkan daripada sumber daya alam yang tidak dimaksimalkan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya ini, pemerintah desa Kwadengan mendirikan balai pelatihan keterampilan untuk para warga agar memiliki keterampilan yang berdampak positif. Desa juga bisa mengadakan berbagai seminar atau sosialisasi di desa agar masyarakat tergerak lebih kreatif dan berani mengembangkan usaha dengan ide yang mereka punya. Masyarakat yang berani membangun sebuah usaha dengan ide yang kreatif, mampu menjadi aset desa yang cukup membantu untuk memajukan masyarakat desa dan tentu saja membuka lapangan pekerjaan baru yang akan meningkatkan perekonomian warga desa.

Penelitian ini menggunakan Teori Peran Biddle and Thomas ada lima istilah perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu *expectation*, *norm*, *performance*, *evaluation* saling berkaitan dalam perilaku peran. Harapan dan norma merupakan segala sesuatu yang berisi harapan atau keinginan masyarakat tentang perilaku yang menyertai suatu peran. Kemudian munculah wujud perilaku sebagai realisasi dari harapan dan norma tersebut sehingga timbulah penilaian dan sanksi terhadap perilaku yang telah diwujudkan tersebut.

Berdasarkan hasil angket yang diperoleh dari penelitian, diperoleh data mengenai pelaksanaan peran

PKK dalam menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo. Peran PKK sangat penting dalam pembangunan Desa, karena dengan adanya PKK mendorong masyarakat terutama perempuan ikut serta dalam kegiatan untuk memajukan desanya. Apabila desa maju otomatis masyarakat yang ada didalamnya ikut berkembang. Tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui peran PKK dalam pembangunan masyarakat dilihat dari 4 indikator, yaitu harapan, norma, wujud perilaku, dan penilaian sanksi

Pada indikator harapan yang dimaksud harapan-harapan orang pada umumnya tentang bagaimana orang tersebut bisa merencanakan program kegiatan, melaksanakan program kegiatan dan mengevaluasi program kegiatan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakatnya. Kemudian dari indikator norma adalah salah satu bentuk harapan yang menyertai suatu peran dan merupakan suatu tuntunan peran (role deman). Tuntunan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan. Pada umumnya tentang bagaimana PKK bisa mengatur sistem dalam masyarakatnya dan sebagai petunjuk perilaku yang pantas ditunjukkan oleh seorang yang mempunyai peran tersebut.

Sedangkan dari indikator wujud perilaku yang dimaksud adalah perwujudan perilaku secara nyata dalam suatu peran oleh aktor kepada target sasaran. Pada umumnya tentang bagaimana melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan serta taat terhadap peraturan yang sudah dibuat. Bila suatu saat tidak bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik maka sanksi yang sudah disetujui akan diberlakukan seperti dalam indikator terakhir penilaian dan sanksi. Penilaian dan sanksi adalah segala sesuatu yang didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma. Berdasarkan norma tersebut orang memberikan penilaian berupa kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan nilai positif agar perwujudan perilaku dalam peran di ubah sedemikian rupa sesuai dengan harapan dan norma di masyarakat.

Berdasarkan hasil penghitungan angket yang telah dilakukan, dalam indikator harapan dengan tiga sub indikator, yaitu a) merencanakan program kegiatan, b) melaksanakan program kegiatan, c) mengevaluasi program kegiatan menunjukkan rata-rata sebesar 30,36, dengan rincian sebanyak 99 orang yang menjadi responden, terdapat 42 orang atau persentase sebesar 42,42% dalam kategori cukup baik. Kemudian terdapat 57 orang atau persentase sebesar 57,58% dalam kategori kurang baik. Dan tidak terdapat responden yang termasuk kategori kurang baik. Karena skor rata-rata yang diperoleh responden tergolong dalam kategori kurang baik dan

jumlah persentase kategori tertinggi adalah kurang baik, maka pelaksanaan peran PKK pada indikator harapan menunjukkan suatu harapan yang kurang baik.

Indikator yang kedua adalah norma, dalam indikator norma terdapat dua sub indikator, yaitu a) mengatur sistem dalam masyarakat b) petunjuk perilaku yang benar. Berdasarkan penghitungan angket yang telah dilakukan, indikator norma menunjukkan rata-rata sebesar 23,86, dengan rincian sebanyak terdapat 96 orang atau persentase sebesar 96,97% dalam kategori cukup baik. Kemudian terdapat 3 orang atau persentase sebesar 3,03% dalam kategori kurang baik dan tidak terdapat responden yang termasuk kategori baik. Karena skor rata-rata yang diperoleh peserta didik reguler tergolong dalam kategori cukup baik dan jumlah persentase kategori tertinggi adalah kategori cukup baik, maka pelaksanaan peran PKK pada indikator norma dalam pelaksanaan peran PKK menunjukkan suatu norma yang cukup baik.

Indikator yang ketiga adalah wujud perilaku, dalam indikator perilaku terdapat dua sub indikator, yaitu a) melaksanakan tanggung jawab terhadap tugas b) taat terhadap peraturan, indikator wujud perilaku menunjukkan rata-rata sebesar 27,07, dengan rincian sebanyak terdapat 99 orang atau persentase sebesar 100% dalam kategori cukup baik dan tidak terdapat responden yang termasuk kategori baik dan kategori kurang baik. Karena skor rata-rata yang diperoleh responden termasuk dalam kategori cukup baik dan jumlah persentase kategori tertinggi berada pada kategori cukup baik, maka pelaksanaan peran PKK pada indikator wujud perilaku dalam pelaksanaan peran PKK menunjukkan suatu wujud perilaku yang cukup baik.

Indikator yang keempat adalah penilaian sanksi, dalam indikator perilaku terdapat dua sub indikator, yaitu a) memberikan saran atau kritik b) pemberian *reward* dan *punishment*, indikator penilaian sanksi menunjukkan rata-rata sebesar 18,28, dengan rincian sebanyak terdapat 99 orang atau persentase sebesar 100% dalam kategori baik dan tidak terdapat responden yang termasuk kategori cukup baik dan kategori kurang baik. Karena skor rata-rata yang diperoleh responden termasuk dalam kategori baik dan jumlah persentase kategori tertinggi berada pada kategori baik, maka pelaksanaan peran PKK pada indikator penilaian sanksi dalam pelaksanaan peran PKK menunjukkan suatu wujud perilaku yang baik.

Data setiap indikator menunjukkan hasil yang berbeda-beda, pada indikator harapan diperoleh hasil kurang baik, pada indikator norma diperoleh hasil cukup baik, pada indikator wujud perilaku diperoleh hasil cukup baik, sedangkan pada indikator penilaian sanksi diperoleh hasil baik. Perbedaan hasil pada setiap indikator penelitian menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan teori peran Biddle and Thomas, karena hasil

penelitian menunjukkan bahwa keempat perilaku dalam peran tersebut memperoleh hasil tidak sama. PKK di Kwadengan Barat sudah menjalankan 4 teori tersebut namun ada beberapa teori yang belum terlaksana dengan baik seperti *expectation*, dalam *expectation* harapan-harapan orang pada umumnya tentang peran bagaimana orang tersebut bisa merencanakan program kegiatan, melaksanakan program kegiatan dan mengevaluasi program kegiatan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakatnya. Sedangkan teori yang kuat dalam penelitian ini *evaluation*, karena *evaluation* dapat pemberian nilai dan sanksi agar terwujud perilaku peran yang sesuai.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran PKK dalam menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo jika ditinjau dari keempat indikator yang menjadi tolok ukur untuk dapat melihat bagaimana pelaksanaan peran PKK dalam menggerakkan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo, yaitu harapan, norma, wujud perilaku, dan penilaian sanksi. Pada Indikator harapan peran PKK dalam pembangunan di Desa Kwadengan Barat Kecamatan Sidoarjo mendapatkan kategori skor kurang baik karena peran yang dilakukan PKK dalam pembangunan masyarakat tidak sesuai dengan harapan masyarakat, indikator norma tergolong kategori cukup baik karena peran yang dilakukan PKK dalam pembangunan masyarakat meningkatkan kesadaran hidup bergotong royong, kesetiakawanan sosial, keamanan lingkungan.

Sedangkan dari indikator wujud perilaku tergolong kategori cukup baik seperti perwujudan perilaku secara nyata dalam suatu peran oleh aktor kepada target sasaran. Pada umumnya tentang bagaimana melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan serta taat terhadap peraturan yang sudah dibuat. Yang terakhir indikator penilaian dan sanksi tergolong kategori baik karena peran yang dilakukan PKK dalam pembangunan masyarakat memberikan penilaian berupa kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku dan mempertahankan nilai agar perilaku dalam peran di ubah sedemikian rupa.

Hasil penelitian yang berbeda-beda dalam setiap indikator menunjukkan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan tidak sesuai dengan teori peran Biddle and Thomas yang menyatakan bahwa *expectation*, *norm*, *performance*, and *evaluation* saling berkaitan dalam perilaku peran. Namun pada hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat perilaku dalam peran tersebut

memperoleh hasil tidak sama. Secara umum pelaksanaan peran PKK untuk menggerakkan partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat telah berperan, karena pelaksanaan PKK di Kwadengan Barat sudah merencanakan program-program, kegiatan yang ingin dicapai sudah berjalan baik, anggota PKK sudah melaksanakan tugas dengan baik hanya saja partisipasi dari masyarakat perempuan kurang terlibat dalam agenda yang sudah dibuat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu (a) Semoga dengan adanya penelitian ini PKK lebih meningkatkan kinerjanya dalam pembangunan masyarakatnya khususnya PKK di Desa Kwadengan Barat, Kecamatan Sidoarjo agar desa mereka maju. Terutama masyarakatnya juga harus mau bekerjasama dengan PKK, tanpa adanya PKK masyarakat perempuan menjadi terbelakang terutama perempuan yang sudah menikah. Maka dari itu perempuan-perempuan diluar sana harus keluar dari zona nyaman dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat; (b) Untuk penelitian selanjutnya semoga bisa menggunakan metode kuantitatif yang lebih besar ruang lingkup respondennya mengingat jumlah penduduk semakin tahun semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliya. 2017. Penerapan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- Ali, Madekhan. 2000. *Orang Desa Anak Tiri* Perubahan. Malang: Everroes Press
- Buku Laporan PKK Desa Kwadengan Tahun 2017
- Buku Pintar PKK. 2017, hal 14 (diakses pada tanggal 11 Februari 2020)
- Darwin, M. Muhadjir. 2005. Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Wacana
- Davis, Keith. 1990. Perilaku dalam Organisasi; Jakarta: Erlangga.
- Harton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1996. Sosiologi, jilid 1 Edisi Keenam, (Ahli Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Panduan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 1992
- Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan, 2008; Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2013. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga. Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2007. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Atau Kelurahan

- Rinawati Rini. 2004. Partisipasi Wanita Dalam Pembangunan
- Sarwono. 2015. Teori-Teori Psikologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno. 1997. Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan. Yogyakarta: Kanisius.
- Sofiani Triana. 2009. Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan. Hal 63-71
- Sofyan Syukrie Erna. 2003. Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- UU Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
- Wati Ima. 2014. Peranan PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung

